

Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Alokasi Dana Desa

Safira Mukaromah¹, Nashva Azzahra Maharani Safitri², Marcelleno³, Lukas Imanuel⁴

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung Gang IV No.1, Balunijuk, Kec Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172. Email : safiramukaromah630@gmail.com, theoneofus116@gmail.com, marcelleno1103@gmail.com, lukasmanuel8130@gmail.com.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa. Kebijakan yang dapat mempercepat dan meningkatkan efektivitas program pembangunan serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, yang sebelumnya lebih diatur oleh pemerintah pusat. Dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada pemerintah daerah, diharapkan kebijakan pembangunan dapat lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa di daerah masing-masing. Konsep pengelolaan keuangan pemerintah daerah meliputi prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Transparansi mengacu pada perolehan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran serta publikasi informasi terkait keuangan daerah. Efektivitas dan efisiensi terkait dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola publik keuangan dengan memperhatikan tujuan dan sumber daya yang tersedia. Efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam mengelola dana desa merupakan hasil dari interaksi beberapa faktor yang saling terkait, seperti adanya kebijakan dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa. Peran masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa tidak boleh diabaikan. Melalui mekanisme seperti musyawarah desa, penggunaan teknologi informasi, dan pembentukan lembaga pengawas desa, masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana desa secara lebih efektif. Kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa memiliki peran penting dalam mempercepat

pembangunan di wilayah pedesaan. Alokasi dana desa yang tepat sasaran dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta membantu mengurangi ketegangan sosial antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Kata Kunci : Dana Desa, Keuangan Pemerintah, Kebijakan Alokasi

ABSTRACT

This study aims to explore the local government's policies on financial management and the allocation of village funds. These policies are designed to expedite and enhance the effectiveness of development programs as well as promote equitable development throughout Indonesia, which was previously primarily regulated by the central government. By granting greater authority to local governments, it is expected that development policies can be more adaptive and responsive to the needs of rural communities in their respective regions. The concept of local government financial management encompasses fundamental principles that should be followed, including transparency, accountability, effectiveness, and efficiency. Transparency refers to the acquisition of information during budget preparation and implementation, as well as the publication of relevant financial information. Effectiveness and efficiency are related to the local government's ability to manage public finances while considering objectives and available resources. The effectiveness of local government's financial management in handling village funds is the result of various interconnected factors, such as the presence of good policies and governance in fund management. The role of communities in supervising the utilization of village funds should not be disregarded. Through mechanisms such as village deliberations, information technology utilization, and the establishment of village oversight institutions, communities can monitor and supervise the use of village funds more effectively. The local government's policies on financial management and the allocation of village funds play a crucial role in accelerating rural development. Targeted allocation of village funds, along with effective and efficient financial management, can enhance the well-being of rural communities and help reduce social tensions between urban and rural areas.

Keyword : Civis education, multicultural citizenship, local wisdom

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada era desentralisasi keuangan yang dimulai sejak tahun 1999, terjadi perubahan signifikan dalam sistem pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa di Indonesia, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola dan mengalokasikan dana desa. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas program pembangunan serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, yang sebelumnya lebih terpusat pada pemerintah pusat. Dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada pemerintah daerah, diharapkan kebijakan pembangunan dapat lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa di daerah masing-masing.

Pemerintah daerah dapat merencanakan, mengelola, dan mengalokasikan dana desa secara lebih efektif dan efisien, sehingga dapat menghasilkan hasil pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan di desa.

Dalam rangka mencapai tujuan pengembangan desa yang berkelanjutan, pemerintah daerah dituntut untuk memperhatikan berbagai aspek yang relevan dalam pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa. Seiring dengan bertambahnya tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, peran masyarakat dalam pengawasan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan juga semakin penting dan harus diakui serta diperkuat. Oleh karena itu, keberhasilan program pembangunan di desa tidak hanya bergantung pada efektivitas pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa saja, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Pemerintah daerah harus memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat desa untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat harus ditingkatkan dan dipraktikkan secara nyata dalam setiap tahapan pembangunan desa, sehingga dapat meningkatkan kualitas program pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa.

Dalam mengambil keputusan, pemerintah daerah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat desa dan memastikan bahwa alokasi dana desa digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pembangunan desa. Dengan demikian, pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa yang baik dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah dan pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, tulisan ini akan membahas mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, termasuk tantangan dan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaannya. Makalah ini juga akan membahas tentang berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan

dan alokasi dana desa, serta peran masyarakat dalam pengawasan dan partisipasi dalam pembangunan di desa.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam mengelola dana desa?
2. Bagaimana peran masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa dan apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan tersebut?
3. Bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa terhadap pembangunan di desa dan kesejahteraan masyarakat desa?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian normatif, dimana pembahasan dalam jurnal ini berdasarkan pada dokumen-dokumen dan pengaturan-pengaturan serta referensi lain yang berkenaan dengan permasalahan kebijakan pemerintah daerah melalui pendekatan yuridis normatif untuk mengetahui bagaimana peraturan-peraturan secara normatif mengenai kebijakan pemerintah daerah dan ketentuan yang terdapat di dalamnya terutama yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa.

4. Landasan Teori

a. Konsep Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Konsep pengelolaan keuangan pemerintah daerah meliputi prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Transparansi mengacu pada keterbukaan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran serta publikasi informasi terkait keuangan daerah. Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pelaporan, dan pengawasan. Efektivitas dan efisiensi berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik dengan memperhatikan tujuan dan sumber daya yang tersedia.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang berbasis pada *Good Financial Governance* (GFG) meliputi: transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, keterlibatan masyarakat sipil, efisiensi, efektivitas, dan kesetaraan⁵. *Good Financial Governance* (GFG) adalah konsep pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang mengedepankan prinsip-prinsip dasar, termasuk namun tidak terbatas pada transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran serta publikasi informasi terkait keuangan daerah, partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelaporan dan pengawasan pengelolaan keuangan publik, keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan publik, efisiensi dalam

⁵Budiyanto, A. S. (2015). *Public Financial Management in Indonesia*. New York City: Springer.

penggunaan sumber daya keuangan daerah, efektivitas dalam mencapai tujuan pengelolaan keuangan publik, dan kesetaraan dalam memperhatikan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga memberikan dasar hukum untuk pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Pasal 1 angka 5 UU tersebut mendefinisikan pengelolaan keuangan negara sebagai "pengumpulan, pengelolaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". UU tersebut juga memberikan ketentuan mengenai prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang efektif dan efisien haruslah mengedepankan prinsip-prinsip Good Governance, yang mencakup transparansi dalam semua aspek pengelolaan keuangan publik, akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan daerah, serta pengawasan yang efektif dan independen untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi dan penyalahgunaan keuangan daerah. Perlu ditekankan pentingnya implementasi Good Governance dalam konteks pengelolaan keuangan publik di Indonesia, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik⁶.

b. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan salah satu instrumen kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan⁷. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan, pemerintah Indonesia melalui kebijakan dana desa telah mengalokasikan sumber daya keuangan yang signifikan secara langsung kepada pemerintah desa untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Untuk menjaga keadilan dan kesetaraan, formula yang digunakan dalam mendistribusikan dana desa mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain jumlah penduduk dan luas wilayah desa. Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas juga menjadi landasan penting dalam penggunaan dana desa, di mana pemerintah desa diwajibkan untuk memberikan laporan penggunaan dana secara terbuka dan transparan. Penerapan transparansi dan akuntabilitas penting

⁶Adiningsih, S. (2014). Public Financial Management Reforms in Indonesia: The Journey So Far. *Jurnal Bina Praja*, 6(2), 131-145.

⁷AswicaHyono, H., Narjok, D. P., & Pattinasarany, D. R. (2019). The Impact of Village Funds on Village Socio-Economic Development: Evidence from Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(2), 123-144.

dalam penggunaan dana desa untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana tersebut⁸.

Dalam praktiknya, alokasi dana desa telah membawa dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan, terutama melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sebagai contoh, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2018, dana desa telah berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana, seperti jalan desa, sumber air bersih, dan listrik. Namun, di sisi lain, terdapat pula beberapa tantangan dalam pengelolaan dan pengawasan penggunaan dana desa yang perlu diperhatikan, antara lain kurangnya kapasitas dan keterampilan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan publik, serta risiko tindakan korupsi dan penyalahgunaan dana desa yang dapat terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus-menerus dalam meningkatkan pengelolaan dan pengawasan penggunaan dana desa dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan membangun kapasitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan publik⁹.

Oleh karena itu, diperlukan peran aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa, serta dukungan dan pendampingan dari pihak-pihak terkait, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa partisipasi masyarakat penting dalam proses pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa, serta peran aktif LSM dan media massa dalam memberikan informasi dan publikasi terkait pengelolaan dana desa¹⁰.

c. Isu terkait Pengelolaan dan Kebijakan Dana Desa

Isu terkait pengelolaan dan kebijakan dana desa yang menjadi perhatian utama adalah transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana tersebut. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang menunjukkan masih banyak terjadi praktik korupsi dan penyalahgunaan dana desa oleh oknum pemerintah desa, yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat desa dan merugikan pembangunan di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan penguatan pengawasan dan monitoring dalam penggunaan dana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa. Peningkatan kapasitas dan keterampilan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan publik juga perlu diperhatikan¹¹. Selain itu, masih terdapat kendala dalam hal kapasitas dan keterampilan pemerintah desa dalam mengelola

⁸Suryanto, S. (2018). Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(3), 267-280.

⁹Nuryanti, E. (2020). Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 114-124.

¹⁰Adiputra, I. N., Kurniawan, T., & Kurniawan, D. (2018). The Role of Public Participation in Monitoring Village Fund Disbursement in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 19(2), 132-143.

¹¹Kurniawan, B. (2020). Penyalahgunaan Dana Desa dan Faktor yang Mempengaruhi (Studi Kasus di Desa Banyusari, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 1-14.

keuangan publik dan memperoleh informasi yang akurat dan lengkap mengenai pengelolaan dana desa¹².

Untuk mengatasi isu-isu terkait pengelolaan dan kebijakan dana desa, perlu adanya upaya yang komprehensif. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa melalui berbagai mekanisme, seperti memberikan akses informasi yang terbuka dan memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa. Selain itu, pemerintah desa perlu diberikan pelatihan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan publik, sehingga dapat mengelola dana desa secara efektif dan efisien.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa juga perlu menjadi perhatian utama, sehingga dapat memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa terakomodasi dalam penggunaan dana desa. Selain itu, perlu juga adanya peran aktif dari lembaga pengawas dan auditor independen untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak terjadi praktik korupsi dan penyalahgunaan dana desa¹³.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pemerintah dalam Mengelola Dana Desa

Efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam mengelola dana desa merupakan hasil dari interaksi beberapa faktor yang saling terkait, seperti adanya kebijakan dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa, tingkat transparansi yang tinggi dalam penggunaan dana desa sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaannya dengan jelas, akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan dan proyek yang dibiayai dari dana desa, partisipasi aktif dan efektif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan dana desa, serta pengawasan yang efektif dari pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan tujuannya dan tidak terjadi penyalahgunaan atau tindakan korupsi¹⁴.

Pengelolaan dana desa oleh pemerintah daerah seringkali menghadapi tantangan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang dapat berdampak pada rendahnya efektivitas pengelolaan dana desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang jelas dan tata kelola yang baik untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa, yang diimbangi dengan transparansi dalam pengelolaan dana desa agar masyarakat dapat memantau penggunaannya secara terbuka dan dapat memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dana desa, partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan dana desa untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terpenuhi, serta pengawasan yang efektif dari pihak yang berwenang untuk memastikan

¹² Hariyanto, B. (2018). *Desentralisasi Fiskal: Tantangan, Permasalahan, dan Solusi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

¹³ Sari, L. M. (2021). Analisis Pelaksanaan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Sragen. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 23-34.

¹⁴ Mardiasmo. (2014). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

akuntabilitas dan mencegah terjadinya tindakan korupsi dalam penggunaan dana desa. Semua faktor tersebut menjadi penting untuk mencapai efektivitas pengelolaan dana desa¹⁵.

Sementara itu, partisipasi aktif dan efektif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan cara memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik dan transparan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat juga dapat membantu dalam menentukan prioritas pembangunan desa yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dana desa. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dapat mencakup banyak hal, seperti diskusi terbuka, konsultasi publik, forum pemangku kepentingan, dan juga pemantauan dan evaluasi oleh masyarakat atas kegiatan yang dilaksanakan. Semua upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa tidak hanya dilakukan secara efektif, tetapi juga berdampak positif bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat¹⁶.

2. Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa

Dalam konteks pengawasan penggunaan dana desa, partisipasi masyarakat dianggap sebagai salah satu faktor penting untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dinilai cukup tinggi dan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa juga dapat meningkatkan penggunaan dana desa yang lebih efektif dan efisien, serta dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di desa.

Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa tidak boleh diabaikan. Melalui mekanisme seperti musyawarah desa, penggunaan teknologi informasi, dan pembentukan lembaga pengawas desa, masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana desa secara lebih efektif. Masyarakat juga dapat memberikan masukan dan saran terkait penggunaan dana desa kepada pemerintah desa, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas penggunaan dana desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa sangat penting dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa diharapkan dapat memberikan beragam manfaat bagi pengelolaan dana desa, seperti meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk kepentingan masyarakat desa, serta mencegah terjadinya tindak korupsi dan penyalahgunaan dana desa dengan meminimalisir risiko pelanggaran dan penyimpangan dalam pengelolaan dana

¹⁵ Djalante, R., Wardhana, A., & Kurniawan, J. (2018). The effectiveness of village funds management in Indonesia: A review of the literature. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 33(1), 56-73.

¹⁶ Sulistyowati, E. (2020). Village fund management in Indonesia: A literature review. *Public Administration and Policy Review*, 8(2), 49-59.

desa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa serta mengurangi risiko pelanggaran dan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa¹⁷.

Selain itu, Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa tidak hanya berdampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa, serta mencegah terjadinya tindak korupsi dan penyalahgunaan dana desa, tetapi juga dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah desa dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di wilayah desa. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan dana desa dan pemerataan pembangunan di wilayah desa. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pembangunan di wilayah desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa, seperti melalui peningkatan literasi keuangan dan penguatan lembaga-lembaga pengawas desa¹⁸.

3. Kebijakan Alokasi Dana Desa Dibuat Dan Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance dalam kebijakan alokasi dana desa, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya. Pemerintah daerah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa dengan melakukan sosialisasi secara terus-menerus tentang proses alokasi dan penggunaan dana desa, serta melibatkan masyarakat dalam forum-forum musyawarah desa. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian, seperti dengan membangun sistem informasi dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memperkuat lembaga pengawas dan auditor eksternal.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dan penggunaan dana desa telah diakui sebagai sebuah prinsip yang penting dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan demokrasi di tingkat lokal. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa mampu meningkatkan kualitas keputusan dan menjamin keadilan distribusi sumber daya. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa serta mencegah terjadinya tindakan korupsi dan penyalahgunaan dana desa. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperkuat peran masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan akses informasi yang transparan dan memperkuat mekanisme pengawasan oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui

¹⁷Azhar, M., & Sholikin, A. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa: Studi kasus di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 4(2), 101-114.

¹⁸Riani, L., Setiawan, A. T., & Prastiwi, E. (2020). Peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa pada desa Tahunan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 8(1), 1-9.

forum musyawarah desa dan memperkuat peran lembaga-lembaga pengawasan desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penggunaan dana desa, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa alokasi dana desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di wilayah pedesaan. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan oleh masyarakat desa¹⁹. Secara keseluruhan, kebijakan alokasi dana desa harus dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip Good Governance dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penggunaan dana desa. Dengan demikian, alokasi dana desa dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan.

4. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Dan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan yang baik dan alokasi dana desa yang tepat sasaran dapat memberikan dampak positif yang besar bagi pembangunan di wilayah pedesaan. Pengelolaan keuangan yang baik pada dana desa dapat meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah pedesaan. Selain itu, alokasi dana desa yang tepat sasaran juga dapat membantu memperbaiki akses masyarakat desa terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan di wilayah pedesaan.

Praktik korupsi dan penyalahgunaan dana desa oleh oknum pemerintah desa dapat menghambat pembangunan di wilayah pedesaan. Selain itu, pengalokasian dana desa yang tidak tepat sasaran dan tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat desa juga dapat memperlambat pembangunan. Dana desa yang tidak tepat sasaran dapat menghambat kemajuan ekonomi masyarakat desa dan memperburuk kesenjangan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat desa untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga dapat mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan²⁰.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara optimal dan tepat sasaran, serta untuk mengevaluasi hasil dari penggunaan dana desa dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Evaluasi yang dilakukan secara teratur dapat membantu pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk memperbaiki kebijakan alokasi dana desa dan

¹⁹Budiardjo, M. (2017). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

²⁰Amalia, D., Hasanah, I., & Pratiwi, R. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Penyalahgunaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 23(2), 67-78.

memperbaiki sistem pengelolaan keuangan publik di wilayah pedesaan²¹. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pemerintah desa perlu bekerja sama dan memperkuat sinergi dalam mengelola keuangan publik dan alokasi dana desa agar dapat mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan secara efektif dan efisien.

Selain itu, dampak negatif dari alokasi dana desa yang tidak tepat sasaran tidak hanya terbatas pada kemajuan ekonomi masyarakat desa dan kesenjangan sosial, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah pedesaan. Menurut penelitian oleh Hartono dan Sriyana (2019), penggunaan dana desa yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan dapat menimbulkan dampak jangka pendek dan jangka panjang yang merugikan masyarakat desa. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat desa, dan lembaga terkait dalam pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah pedesaan dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa secara keseluruhan²²

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Alokasi dana desa yang tepat sasaran dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta membantu mengurangi kesenjangan sosial antara daerah perkotaan dan pedesaan. Namun, praktik korupsi dan penyalahgunaan dana desa oleh oknum pemerintah desa dapat menghambat pembangunan di wilayah pedesaan dan merugikan masyarakat desa secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat desa untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa dilakukan dengan baik, transparan, dan akuntabel serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

2. Saran

Dari bahasan dan penjabaran pada bagian-bagian sebelumnya, terdapat beberapa saran, yaitu:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dan alokasi dana desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penggunaan dana desa.
2. Memperkuat peran masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut.
3. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan publik dan alokasi dana desa, sehingga pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan baik dan tepat sasaran.

²¹Sukaryono, D., Dzuhi, A., & Wiyono, W. (2020). The Analysis of the Village Fund Allocation Policy in Enhancing Rural Development in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 10(1), 129-142.

²²Wulandari, S., & Puspitasari, E. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Dana Desa dalam Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 25(1), 11-20

4. Memperhatikan kebutuhan masyarakat desa dalam pengalokasian dana desa agar dapat mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.
5. Menerapkan mekanisme pengawasan yang efektif dan efisien untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan dana desa oleh oknum pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, S. (2014). Public Financial Management Reforms in Indonesia: The Journey So Far. *Jurnal Bina Praja*, 6(2), 131-145.
- Adiputra, I. N., Kurniawan, T., & Kurniawan, D. (2018). The Role of Public Participation in Monitoring Village Fund Disbursement in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 19(2), 132-143.
- Amalia, D., Hasanah, I., & Pratiwi, R. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Penyalahgunaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(2), 67-78.
- Aswicahyono, H., Narjok, D. P., & Pattinasarany, D. R. (2019). The Impact of Village Funds on Village Socio-Economic Development: Evidence from Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(2), 123-144.
- Azhar, M., & Sholikin, A. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa: Studi kasus di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 4(2), 101-114.
- Budiyanto, A. S. (2015). *Public Financial Management in Indonesia*. New York City: Springer.
- Djalante, R., Wardhana, A., & Kurniawan, J. (2018). The effectiveness of village funds management in Indonesia: A review of the literature. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 33(1), 56-73.
- Mardiasmo. (2014). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nuryanti, E. (2020). Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 114-124.
- Riani, L., Setiawan, A. T., & Pratiwi, E. (2020). Peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa pada desa Tahunan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 8(1), 1-9.
- Sari, L. M. (2021). Analisis Pelaksanaan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Sragen. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 23-34.
- Sukaryono, D., Dzuhri, A., & Wiyono, W. (2020). The Analysis of the Village Fund Allocation Policy in Enhancing Rural Development in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 10(1), 129-142.
- Sulistyowati, E. (2020). Village fund management in Indonesia: A literature review. *Public Administration and Policy Review*, 8(2), 49-59.
- Suryanto, S. (2018). Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(3), 267-280.

Wulandari, S., & Puspitasari, E. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Dana Desa dalam Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 25(1), 11-20.